
Analisis Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh

Sufitrayati¹, Mahdi²

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

Sufitrayati@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan 51 sampel dari 105 populasi. Tehnik pengumpulan data dengan membagikan kuisisioner, dan analisis regresi sebagai alat analisis. Hasil peneliti menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh. Nilai konstanta sebesar 1,657 dapat diartikan bahwa tanpa adanya partisipasi penyusunan anggaran, maka kinerja aparat pemerintah tetap sebesar 1,657. Nilai koefisien (b) sebesar 0,792, maka apabila terjadi partisipasi penyusunan anggaran sebesar 1 satuan, maka akan mempengaruhi kinerja aparat pemerintah sebesar 79,2%. Artinya setiap 100% perubahan partisipasi penyusunan anggaran maka secara relatif akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah kota Banda Aceh. Koefisien Korelasi R sebesar 0,807 yang menunjukkan bahwa derajat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 80,7%, artinya partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja Aparat pemerintah daerah. Nilai R^2 sebesar 0,536 artinya kemampuan independen dalam menjelaskan dependen variabel adalah sebesar 53,6%, sedangkan sisanya sebesar 46,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Partisipasi, Anggaran, Kinerja, Pemerintah

I. PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Ruspina, 2013). Pada kinerja pemerintahan di Aceh, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengelola anggaran masyarakat masih belum memuaskan. Permasalahan mendesak yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintahan Daerah di Aceh, yaitu masih rendahnya daya serap anggaran dalam APBA dan APBK. Artinya, pengelolaan dana APBA dan APBK di Aceh, selama 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) belum dikelola sesuai dengan harapan masyarakat.

Hal tersebut karena belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran yang mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Akibatnya, daya serap yang rendah memunculkan masalah pengelolaan keuangan daerah yang buruk, sehingga semakin tidak maksimalnya pemerintahan di Aceh menyediakan pelayanan hak-hak dasar bagi masyarakat. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke panitia eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draf kebijakan pembangunan dan kebijakan anggaran tahunan yang nantinya akan dibahas pihak legislatif (Permendagri No 13 Tahun 2006).

Partisipasi penyusunan anggaran adalah salah satu cara menciptakan pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan organisasi tersebut. Tetapi partisipasi penyusunan anggaran tidak akan secara langsung meningkatkan kinerja tanpa adanya dukungan faktor eksternal dan internal yang akan meningkatkan kinerja organisasi. Penulis ingin melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja aparat pemerintahan dinilai dari bagaimana anggota-anggota dalam sektor pemerintahan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di organisasinya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani Mahsun (2006:113). Menurut Santoso (2009:84) ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan. Dengan adanya keterlambatan dalam pengesahan menyebabkan banyak program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan sehingga menghambat pembangunan daerah tersebut.

Menurut Santoso (2009:162) ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran

APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan.

Beberapa pendekatan untuk mengukur sejauh mana karyawan mencapai suatu kinerja secara individual menurut Santoso (2009:89) adalah sebagai berikut:

1. Kualitas
Tingkat dimana hasil aktifitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara yang ideal dari penampilan aktifitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktifitas.
2. Kuantitas
Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktifitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan Waktu
Tingkat suatu aktifitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas lain.
4. Efektifitas
Tingkat penggunaan sumber daya manusia organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian
Tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa minta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan.

2.2 Karakteristik Anggaran

Mardiasmo (2009), mendefinisikan anggaran juga merupakan suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengguna dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Anggaran memiliki sifat khas tertentu dengan mengukur anggaran dalam satuan keuangan maupun nonkeuangan, yang dibuat oleh manajemen sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi yang umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan alat manajemen dalam melakukan perkiraan penggunaan dana dengan efektif dan efisien yang mempertimbangkan alternatif-alternatif tertentu bagi kebaikan dan keuntungan organisasi. Mahsun (2006:128).

2.3 Partisipasi anggaran

Hansen dan Mowen (2009:448) menjelaskan partisipasi anggaran memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebaskan anggaran kepada para manajer tingkat bawah.

Partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas, karena adanya keterlibatan manajer tingkat bawah dalam pembuatan anggaran, tujuan anggaran akan lebih menjadi tujuan pribadi para manajer yang akan menghasilkan kesesuaian tujuan yang lebih besar. Peningkatan tanggungjawab dan tantangan inheren dalam proses tersebut akan memberikan insentif non-uang yang mengarah pada tingkat yang lebih tinggi.

Proses penganggaran pada umumnya mempunyai tiga pendekatan yaitu, pendekatan dari atas ke bawah (top-down) yang menyatakan eksekutif perusahaan menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat-tingkat yang lebih bawah, kelemahan sistem ini dirasakan oleh manajer yang lebih rendah sebagai pemaksaan yang tidak realistis oleh orang-orang yang tidak langsung bersentuhan dengan aktivitas bisnis.

Pendekatan kedua adalah bawah-atas (bottom up), dimana manajer yang lebih rendah yang menentukan anggaran sehingga kelemahannya sering mengabaikan eksekutif. Sistem ketiga adalah partisipasi atau pendekatan menerima dan memberi, dengan manajer pada berbagai tingkatan berunding untuk mencapai anggaran yang memuaskan semua pihak.

2.4 Indikator Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002) dalam partisipasi anggaran pada akuntansi sektor pemerintahan terdapat empat siklus anggaran yang meliputi empat tahap sebagai berikut :

1. Tahap persiapan anggaran
Pada tahapan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia
2. Tahap Ratifikasi
Tahap ratifikasi ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, dan coalition building yang memadai. Dalam hal ini integritas dan kesiapan mental (coalition building) sangat penting, karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari pihak legislatif.
3. Tahap implementasi /pelaksanaan anggaran
Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan pemerintah. Dalam hal ini manajer keuangan publik mempunyai sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.
4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran
Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem

pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pelaporan dan evaluasi anggaran tidak akan menemukan banyak masalah.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (Kepmendagri No 13 tahun 2006). Menurut Agyris (1952) dalam Andharawati (2010) untuk mencegah dampak fungsional atau disfungsional, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan bawahan (aparatur pemerintah daerah). Sehingga partisipasi anggaran dapat dinilai sebagai pendekatan aparat pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual. Jadi, dapat digambarkan kerangka pemikiran pada penelitian ini seperti pada gambar 2.1.



Gambar 2.1: Skema Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, landasan teoritis, maka hipotesis penelitian ini adalah “Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kota Banda Aceh”.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Walikota Banda Aceh yang beralamat Jl. Tgk. Syech Mudawali No.6 Banda Aceh, dengan objek penelitian pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh yang berjumlah 105 orang, penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan formulasi sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Ginting et.al,2008:132) adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

N = Besar populasi

n = Besar sampel

e = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (90%=0,10)
 maka perhitungan yang dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{105}{1 + 105(0,10)^2} \\
 &= \frac{105}{1 + 105(0,01)} \\
 &= \frac{105}{1 + 1,05} \\
 &= \frac{105}{2,05} \\
 &= 51,21 \sim 51 \text{ orang}
 \end{aligned}$$

Maka dari hasil perhitungan diperoleh sampel sebanyak 51 orang, Penarikan sampel dilakukan secara acak random sampling. Seperti dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel

No	Bidang	Populasi	Sampel
1.	Kepala Dinas	1	1
2.	Sekretariat	3	1
3.	Bidang Pendataan	3	2
4.	Bidang Penangihan	3	3
5.	Bidang Anggaran	3	3
6.	Bidang Perbendaharaan	3	3
7.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	3	2
8.	Bidang Aset	3	2
9.	Staff	83	34
Total		105	51

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017

3.3 Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari responden sebanyak 51 pegawai. Menurut Arikunto, (2002), Kuisioner memuat sejumlah pertanyaan dengan format tertentu dan berbagai pilhan didalamnya kemudian disebarkan kepada responden untuk dijawab.

3.4 Skala pengukuran

Alat ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Dengan menggunakan skala likert dan hasil nilai rata-rata akuntansi. Data yang telah dikumpulkan dari penyebaran kuisioner tersebut dalam bentuk kuantatif (Sabrina, 2007),

3.5 Metode Analisa Data

Peralatan regresi merupakan suatu teknik untuk membangun model matematis yang dapat digunakan untuk menganalisa pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen diformulasikan sebagai berikut:

$$Y=a+bx+e$$

Dimana :

- Y = Kinerja Manajerial
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- x = Partisipasi Penyusunan Anggaran
- e = Error term

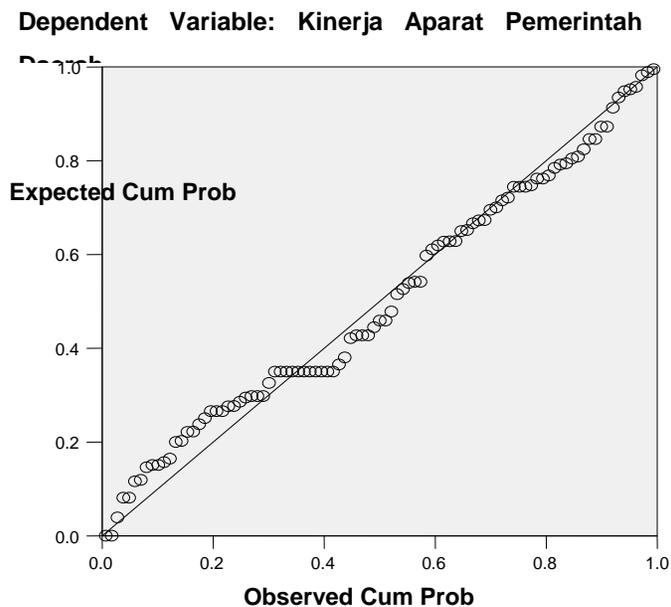
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas gambar normal *Probability Plot* pada SPSS menunjukkan sebaran *standarrized residul* berada dalam kisaran garis diagonal. Normal *Probability Plot* menunjukkan sebaran *standarrized residul* berada dalam kisaran garis diagonal. Seperti terlihat pada gambar 4.1.

Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual

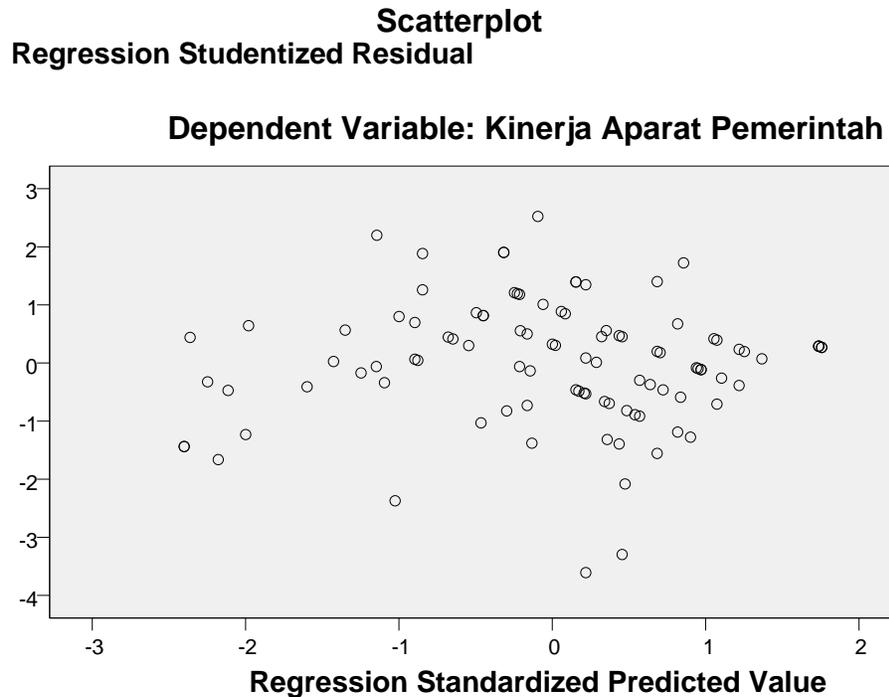


Gambar. 4.1
Probability Plot

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

4.1.2 Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menghasilkan grafik pola penyebaran titik (*scatterplot*) seperti terlihat pada Gambar 4.2.



Gambar. 4.2. Scatterplot

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat titik-titik yang mengindikasikan adanya heteroskedesitas tidak membentuk pola tertentu atau teratur. Dengan demikian dapat diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedesitas.

4.1.3 Pengujian Multikolinearitas

Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi yang tidak stabil, dan juga korelasi antara prediktor dengan variabel dependen kecil serta tidak signifikan. Seperti terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 : Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(constant) Kinerja Pemerintah Daerah	,934	1,070

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* yang lebih kecil dari 10%, yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel bebas yang lebih besar dari 95% yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.2 Regresi Linier

Untuk melihat Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka penelitian akan dilihat dari pengaruh variabel tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 : Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,657	,267		3,186	,002
	Partisipasi Penyusunan anggaran	,792	,064	,691	9,732	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Aparat pemerintah daerah

Sumber: Data diolah : 2018

Berdasarkan Tabel 4.7, maka dapat diformulasikan regresi linier sederhana sebagai berikut

$$Y = 1,657 + 0,792x + e$$

4.3 Koefisien Determinasi

Hasil pengolahan data juga menunjukkan hubungan antara variabel predictor dengan kriteriumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi/koefisien determinasi yang dihasilkan oleh sebuah persamaan regresi. Seperti terlihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 : Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjust R Square	Atd. Error of The Estimate
1	.807 ^a	.536	.728	.47865

Sumber: Data diolah : 2016

4.4 Pembuktian Hipotesis

Hasil penelitian terhadap variabel Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, diperoleh nilai t_{hitung} Partisipasi Penyusunan Anggaran (x) sebesar 9,732, t_{tabel} sebesar 2,008, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} (9,732) > t_{tabel} (2,008)$. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima., artinya Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Banda Aceh

4.5 Pembahasan

Nilai konstanta sebesar 1,657 dapat diartikan bahwa tanpa adanya partisipasi penyusunan anggaran, maka kinerja aparat pemerintah tetap sebesar 1,657. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

Nilai koefisien (b) sebesar 0,792, maka apabila terjadi partisipasi penyusunan anggaran sebesar 1 satuan, maka akan mempengaruhi kinerja aparat pemerintah sebesar 79,2%. Artinya setiap 100% perubahan partisipasi penyusunan anggaran maka secara relatif akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah kota Banda Aceh.

Koefisien Korelasi R sebesar 0,807 yang menunjukkan bahwa derajat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 80,7%, artinya partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja Aparat pemerintah daerah.

Nilai R^2 sebesar 0,536 artinya kemampuan independen dalam menjelaskan dependen variabel adalah sebesar 53,6%, sedangkan sisanya sebesar 46,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sebelumnya juga pernah diteliti oleh Sardjito (2007) dengan judul pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah kota Semarang, dan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Ratry (2010) juga meneliti mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi terhadap kinerja. Dan hasilnya menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1,657 artinya Partisipasi Penyusunan Anggaran, dianggap konstan, maka besarnya Kinerja Aparat Pemerintah Daerah adalah sebesar 1,657 pada satuan skala likert, atau Partisipasi Anggaran dikatakan masih rendah, hal ini mengindikasikan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah cenderung kurang baik jika Partisipasi Penyusunan Anggaran konstan atau tetap.
2. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran nilai koefesienya adalah 0,792, artinya bahwa setiap 100% perubahan variabel bebas (partisipasi penyusunan anggaran) maka secara relatif akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah, dengan demikian semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran maka akan semakin besar pengaruhnya dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah kota Banda Aceh.
3. Nilai R sebesar 0,807 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas sebesar 80,7%, artinya Partisipasi Penyusunan Anggaran mempunyai hubungan yang kuat dengan kinerja aparat pemerintah daerah.
4. Nilai determinasi R^2 sebesar 0,536 artinya kemampuan independen dalam menjelaskan dependen variabel adalah sebesar 53,6%, sedangkan sisanya sebesar 46,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Argyris, C. (1952). *The Impact of Budget on People*. The Controllershship Foundation, Inc. Cornell University
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal* 1 (2)
- Brownell, Peter and Mc. Innes Morris. (1986). *Budgetary Participation Motivation and Manajerial Performance*. The Accounting Review
- Frucot and Shearon. (1991). *Budgetary Participation, Locus of Control and Mexian Managerial Performance and Job Satisfaction*. The Accounting Review pp.80-89

- Mahsun, (2006), *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Kantor cabang Perbankan Indonesia Di Jakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Skripsi. Solo.
- Munthaher, Osmad. (2007). *Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. Simposium Nasional Akuntansi.
- Sumarno. J. (2005). *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Rohman, Abdul. (2009). *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi. Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol 9 Nomor 1, februari 2009.
- Ruspina, Depi Oktria. (2013). *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)*. Jurnal Universitas Negeri Padang. Padang.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Internal.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- Viyanti. (2010). *Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Manajement terhadap Penilaian Prestasi Kerja*. Jurnal Ilmiah Akuntansi No.3. Universitas Kristen Maranatha. Bandung.